BAB III

OBYEK PENELITIAN

3.1 Kondisi Umum Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografi beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92 hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten dan kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Dibawah ini merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir 2008:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk di Jawa Barat
Number of Large Population in Jawa Barat
2005 - 2008

Kabupaten/Kota *Regency/City*	2005	2006	2007	2008
Kab/*Reg*				
01. Bogor	4 100 934	4 216 186	4 316 236	4 402 026
02. Sukabumi	2 224 993	2 240 901	2 258 253	2 277 020
03. Cianjur	2 098 644	2 125 023	2 149 121	2 169 984
04. Bandung	4 263 934	4 399 128	3 038 038	3 116 056
05. Garut	2 321 070	2 375 725	2 429 167	2 481 471
06. Tasikmalaya	1 693 479	1 743 324	1 792 092	1 839 682
07. Ciamis	1 542 661	1 565 121	1 586 076	1 605 891
08. Kuningan	1 096 848	1 118 776	1 140 777	1 163 159
09. Cirebon	2 107 918	2 134 656	2 162 644	2 192 492
10. Majalengka	1 191 490	1 197 994	1 204 379	1 210 811
11. Sumedang	1 067 361	1 089 889	1 112 336	1 134 288
12. Indramayu	1 760 286	1 778 396	1 795 372	1 811 764
13. Subang	1 421 973	1 441 191	1 459 077	1 476 418
14. Purwakarta	770 660	784 797	798 272	809 962
15. Karawang	1 985 574	2 031 128	2 073 356	2 112 433
16. Bekasi	1 953 380	1 991 230	2 032 008	2 076 146
17. Bandung Barat	-	-	1 493 225	1 531 072
Kota/*City*				
18. Bogor	844 778	855 846	866 034	876 292
19. Sukabumi	287 760	294 646	300 694	305 800
20. Bandung	2 315 895	2 340 624	2 364 312	2 390 120
21. Cirebon	281 089	285 363	290 450	298 995
22. Bekasi	1 994 850	2 040 258	2 084 831	2 128 384
23. Depok	1 373 860	1 393 568	1 412 772	1 430 829
24. Cimahi	493 698	506 250	518 985	532 114
25. Tasikmalaya	594 158	610 456	624 478	637 083
26. Banjar	173 576	177 118	180 744	184 577
Jawa Barat	**39 960 869**	**40 737 594**	**41 483 729**	42 194 869

Sumber : Suseda 2008, Badan Pusat StatistikProvinsi Jawa Barat
Source : BPS - Statistic of Jawa Barat

Dibawah ini merupakan tabel jumlah Puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 26 Kabupaten atau Kota, dimana dengan tabel tersebut dapat diketahui jumlah puskesmas dari setiap Kabupaten atau Kota dan jumlah keseluruhan puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah tabel jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.2
Jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
1	Kab. Bogor	101
2	Kab. Sukabumi	48
3	Kab. Cianjur	43
4	Kab. Bandung	61
5	Kab. Garut	62
6	Kab.Tasikmalaya	39
7	Kab.Ciamis	51
8	Kab.Kuningan	34
9	Kab. Cirebon	41
10	Kab.Majalengka	29
11	Kab.Sumedang	31
12	Kab.Indramayu	49
13	Kab. Subang	39
14	Kab.Purwakarta	0
15	Kab. Karawang	40

16	Kab. Bekasi	33
17	Kab.Bandung Barat	32
18	Kota Bogor	24
19	Kota Sukabumi	14
20	Kota Bandung	65
21	Kota Cirebon	0
22	Kota Bekasi	31
23	Kota Depok	22
24	Kota Cimahi	0
25	Kota Tasikmalaya	0
26	Kota Banjar	0
	Jumlah	889

Sumber: *www.diskesprovjabar.go.id* Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah total puskesmas yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu delapan ratus delapan puluh sembilan, dari dua puluh enam Kabupaten atau Kota lima diantaranya tidak memiliki puskesmas. Lima Kabupaten atau Kota tersebut adalah Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.

Dibawah ini merupakan tabel daftar nama penyakit menular dan tidak menular yang ada di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari delapan belas penyakit menular dan enam penyakit tidak menular, dimana dengan tabel tersebut dapat diketahui jumlah penyakit yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah

tabel daftar jumlah nama penyakit menular dan tidak menular di Provinsi Jawa Barat:

Tabel 3.3
Daftar Nama Penyakit Menular dan Tidak Menular di Provinsi Jawa Barat

Penyakit Menular	Penyakit Tidak Menular
Anthrax	Asma
Cacar air (Varicella)	Cidera Ginjal Akut
Chikungunya	Diabetes Melitus
Demam Berdarah Dengue	Hipertensi (Darah Tinggi)
Diare	Kanker Payudara
Filariasis	Kelainan PreKanker dan Kanker Kulit
Flu Babi (Swine Influence)	
Hepatitis akut	
Influenza	
Influenza Burung (Avian Influenza)	
Kusta	
Leptospirosis	
Malaria	
Pemeriksaan Laboratorium dan Interpretasinya	
Perawatan pasien Influenza A H1N1/Flu baru H1N1 (*Strain* Mexico) dirumah atau bilamana terjadi wabah	

atau Pandemi	
Pneumonia	
Poliomyenitis	
Tuberkulosis	

Sumber: *www.diskesprovjabar.go.id* Tahun 2010

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah nama penyakit menular dan tidak menular yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu dua puluh lima, yang terdiri dari delapan belas penyakit menular dan enam penyakit tidak menular. Dilihat dari tabel diatas perbandingan antara penyakit menular dan tidak menular maka di Provinsi Jawa Barat lebih banyak penyakit menular dan hanya sedikit penyakit yang tidak menular.

3.1.1 Letak Geografis Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50 - 7°50 LS dan 104°48 - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan Banten serta DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km2 atau 4.435.461 Ha. Kondisi geografis yang strategis ini merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah. Dengan ditetapkannya Wilayah Banten menjadi Provinsi Banten, maka luas wilayah Jawa Barat saat ini menjadi 34.816,96.

3.1.2 Tofografi dan Iklim Provinsi Jawa Barat

Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 0 C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 0 C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.

3.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2008**,** dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian tugas pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat di bidang pembangunan kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Kedudukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga teknis daerah yang berbentuk instasi milik pemerintah daerah dan sebagai penunjang pembangunan kesehatan.

2. Peran

   Peran Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas Pokok

   Tugas pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

4. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang kesehatan.
b. Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit, serta sumber daya kesehatan.

d. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.

e. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2007 dan PP 38 yang mengatur tentang SOTK organisasi perangkat daerah , maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2008, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan walaupun belum lengkap dengan dengan pengaturan UPTD. Saat ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berlokasi di jalan Pasteur no 25 Bandung, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mencakup gedung perkantoran di jalan Pasteur no 25 Bandung dan 4 (empat) UPTD, yaitu:

1. Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Masyarakat (BPTKM) Jl. Pasteur no 31 Bandung.
2. Balai Pengembangan Laboratorium Kesehatan (BPLK) Jl. Sederhana no 3-5.
3. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Jl. Rancaekek dan KP4 Jl. Satria no 94 Cirebon.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat seluruhnya kurang/lebih 360 orang. Data terperinci adalah sebagai berikut:

a. Pejabat eselon II dan III (6 orang)

b. Subbag perencanaan dan pelaporan (14), subbag keuangan (49)

c. Subbag kepegawaian dan umum (91)

d. Seksi akreditasi sarana kesehatan (14)

e. Seksi akreditasi dan pendayagunaan tenaga (18)
f. Seksi legislasi dan kebijakan kesehatan (19)
g. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus (18)
h. Seksi kesehatan keluarga dan gizi (15)
i. Seksi rumah sakit (13)
j. Seksi penyehatan lingkungan (16)
k. Seksi pengendalian penyakit (23)
l. Seksi pengamatan pencegahan penyakit matra (19)
m. Seksi farmasi, kosalkes dan mamin (15)
n. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat (16)
o. Seksi teknologi dan informasi kesehatan (14)

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting actual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya khususnya aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, maka Visi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.

Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Rumusan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan ber Daya Saing Adapun Tujuan, Sasaran dan Kebijakan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Untuk mendorong tingkat pendidikan,kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat.
2. Menjadikan mayarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran:

“Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak”.

Strategi:

“Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapain tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan yang terdiri atas kebijakan, program, dan sasaran”.

Kebijakan:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak.
2. Mengembangkan system kesehatan.
3. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Program:

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin di capai, maka disusun program-program pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah diuraikan diatas dengan sasaran program sebagai berikut:

Kebijakan 1:

Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program upaya kesehatan, dengan sasaran:
    a. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan Desa Siaga dan berperilaku hidup bersih dan sehat.
    b. Meningkatnya keluarga sadar gizi
    c. Meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, dan masyarakat beresiko tinggi.
    d. Menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan atau rujukan /spesialistik yang bermutu.
    e. Meningkatnya penggunaan obat rasional dan pemakaian obat generic di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang.
    f. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran sediaan makanan dan sediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan batra.

g. Teratasinya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi global warming.

h. Meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktifitas fisik dan olah raga yang baik, benar, teratur dan terukur.

Kebijakan 2:

Mengembangkan sistem kesehatan, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program manajemen pelayanan kesehatan,dengan sasaran:

   a. Meningkatnya kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi *center of excellent* /rujukan spesifik berbasis masalah kesehatan Jawa Barat (stroke, jantung, *gerontology*) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia.

   b. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjangnya (laboratorium *diagnostic* kesehatan) regional Jawa Barat (HIV, Flu Burung).

   c. Tersedianya anggaran /pembiayaan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah mencukupi, teralokasi dengan besaran masalah dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna dan diutamakan untuk upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (preventif dan promotif).

   d. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan skala provinsi.

e. Tersedianya berbagai kebijakan,standar pelayanan kesehatan skala Provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan.
f. Terwujudnya sistem informasi dan *surveillance* epidemiologi kesehatan yang *evidence* base, akurat diseluruh Kabupaten/Kota, Provinsi dan *online* dengan nasional.
g. Terwujudnya mekanisme dan jejaring untuk terselenggaranya komunikasi dan terbentuknya pemahaman publik tentang PHBS,pembangunan kesehatan dan masalah kesehatan global, nasional dan lokal.
h. Pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan jaringannya memenuhi standar mutu.
i. Terwujudnya akuntabilitas dan pencapaian kinerja program pembangunan kesehatan yang baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, dengan sasaran:
    a. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan Rumah Sakit.
    b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya.
    c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.

Kebijakan 3:

Meningkatkan upaya pencegahan,pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dengan sasaran sebagai berikut:
    a. Meningkatnya jumlah/persentase desa mencapai Universal Child Immunization(UCI).
    b. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini terhadap peningkatan dan penularan penyakit akibat pemanasan global (global warming).
    c. Meningkatnya upaya pengendalian,penemuan dan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria, penyakit *Vadio Vascular* (Stroke,MI), penyakit metabolisme (DM) dan penyakit jiwa, penyakit gigi dan mulut, penyakit mata dan telinga, penyakit akibat kerja.
    d. Setiap KLB dilaporkan secara tepat kurang dari 24jam kepada kepala instansi kesehatan terdekat.
    e. Setiap KLB/wabah penyakit tertanggulangi secara cepat dan tepat.
    f. Eliminasi penyakit tertentu yang berorientasi pada penguatan sistem,kepatuhan terhadap standard dan peningkatan komitmen para pihak.

g. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan terutama di daerah lintas batas Kab/Kota dan Provinsi.

Kebijakan 4:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan,yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. Program sumber daya kesehatan dengan sasaran:
   a. Meningkatnya jumlah,jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan yang sesuai dengan standar.
   b. Meningkatnya pendayagunaan aparatur kesehatan
   c. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan
   d. Meningkatnya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan (standar nasional Rp. 9000,-/orang/tahun).
   e. Meningkatnya citra pelayanan kesehatan rumah sakit,puskesmas dan jaringannya
   f. Meningkatnya jumlah,jenis dan penyebaran tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan sesuai standar

3.2.3 Program Kerja dan Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan kesehatan tahun 2008-2013 merupakan penajaman,peningkatan cakupan dan kelanjutan dari prioritas pembangunan

kesehatan periode tahun 2005-2008. Prioritas pembangunan kesehatan tersebut dijabarkan setiap tahun dengan issu strategis tahun 2010 sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak,masyarakat miskin,di daerah terpencil,tertinggal dan daerah perbatasan.
2. Intensitas dan penyebaran penyakit (multiple burden of disease),gizi buruk,dan krisis kesehatan akibat bencana
3. Perilaku hidup bersih dan sehat

Sasaran:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas
2. Meningkatnya sumber daya dan infrasturktur pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya pengendalian penyakit,gizi buruk,dan tertanganinya krisis kesehatan akibat bencana
4. Terwujudnya kemitraan strategis dalam penerapan sistem kesehatan provinsi
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Kegiatan unggulan:

1. Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di sarana/fasilitas kesehatan
2. Peningkatan promosi PHBS dan pengembangan Kab/Kota siaga menjadi Kab/Kota sehat
3. Peningkatan pelayanan imunisasi dasar

4. Peningkatan penemuan kasus dan pengobatan TB

3.2.4 Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

I. Rencana Program kegiatan unggulan (*commons goals*)

A. Program Upaya Kesehatan

1. Perbaikan gizi balita propinsi jawa barat
2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Penunjang peningkatan kesehatan ibu dan anak di kecamatan rawan kesehatan
4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
6. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus operasi katarak
7. Pengembanan integrasi dan kesehatan kabupaten/kota siaga
8. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di berbagai Tatanan dan Gema Mapan Remaja (*Save Our Youth*)

B. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

1. Fasilitas dan penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan jawa barat
2. Monitoring dan evaluasi program pembangunan kesehatan
3. Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM)
4. Penyusunan sistem kesehatan provinsi

C. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Peningkatan pencegahan dan pengedalian penyakit yang dapat di cegah dengan immunisasi (PD3I)
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan haji
3. Penyelidikan kejadian efidemiologi (PE KLB)
4. Pemantapan sistem surveilans penyakit penyakit
5. Peningkatan pencegahan dalam penanganan program IMS, HIV/AIDS, dan TBC
6. Fasilitas pelaksanaan ISPA dan Diare
7. Pemantapan dan pelaksanaan eliminasi kusta dan filariasis
8. Pencegahan penularan penyakit DBD/malaria
9. Fasilitas pengendalian program zoonosis
10. Manajemen pengelolaan kesehatan lingkungan
11. Fasilitas, koordinasi bantuan alat suntik untuk imunisasi
12. Kegiatan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana/kerusuhan

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasaranan Puskesmas
2. Bindal ketersediaan pemerataan, mutu, keamanan obat, persediaan farmasi, alkes dan mamin

3. Pemenuhan dan peningkatan fasiltas sarana dan prasarana RS rujukan flu burung, Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit PONEK
4. Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan
5. Kegiatan rehab sarana dan prasarana gudang obat dan perbekalan kesehatan
6. Pengembangan balai kesehatan kerja masyarakat
7. Pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan
8. Peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan
9. Penigkatan sarana dan prasarana penunjang medis

E. Program Sumber Daya Kesehatan

1. Peningkatan kuantitas SDM kesehatan (penempatan tenaga kesehatan strategis)
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan
3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan
4. Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
5. Kemitraan penigkatan kualitas dokter dan *paramedic*

3.2.5 Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Penunjang (*Non Commons Goal*)

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur dinas kesehatan provinsi jawa barat

2. Kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPTKM dinas kesehatan
3. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BPLK
4. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur BKKM
5. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyelenggaraan administrasi perkantoran dinas kesehatan
2. Penyelenggaraan administrasi perkantoran BPLK
3. Penyelenggaraan administrasi perkantoran BPTKM dinas kesehatan jawa barat
4. Penyelenggaraan administrasi perkantoran BKKM
5. Penyelenggaraan administrasi perkantoran

C. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Penyediaan sarana prasaran serta peralatan kantor pada KP4

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal dinas kesehatan
2. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BPTKM dinas kesehatan provinsi jawa barat
3. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BPLK
4. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal BKKM
5. Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal

E. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pada dinas kesehatan provinsi jawa barat
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran pada BPLK
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor BPTKM dinas kesehatan provinsi jawa barat
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

F. Program Perkembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Pemutakhiran data dan informasi kesehatan dan SIK *online*

3.2.6 Rencana Bantuan Tidak Langsung/Bantuan Keuangan

1. Perbaikan gizi balita provinsi jawa barat
2. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak di kecamatan rawan kesehatan (GEMA MAPAN)
4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar
5. Peningkatan integrasi dan kesehatan kabupaten/kota siaga
6. Pemenuhan dan peningakatan fasilitas sarana dan prasarana puskesmas
7. Pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana RS rujukan flu burung, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum PONEK
8. Pengembangan fungsi Puskesmas menjadi Puskesmas PONED

9. Perbaikan pemeliharaan dan pengadaan membelair rumah dinas dokter puskesmas terperinci

3.2.7 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

A. Kepala

B. Sekretariat

   1. Subbagian perencanaan dan program
   2. Subbagian keuangan
   3. Subbagian kepegawaian dan umum

C. Bidang Regulasi dan Kebijakan Kesehatan

   1. Seksi akreditasi sarana kesehatan
   2. Seksi akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan
   3. Seksi legislasi dan kebijakan kesehatan

D. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

   1. Seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus
   2. Seksi kesehatan keluarga dan gizi
   3. Seksi Rumah Sakit

E. Bidang Bina Penyehatan Lingkungan dan Pencegahan Penyakit

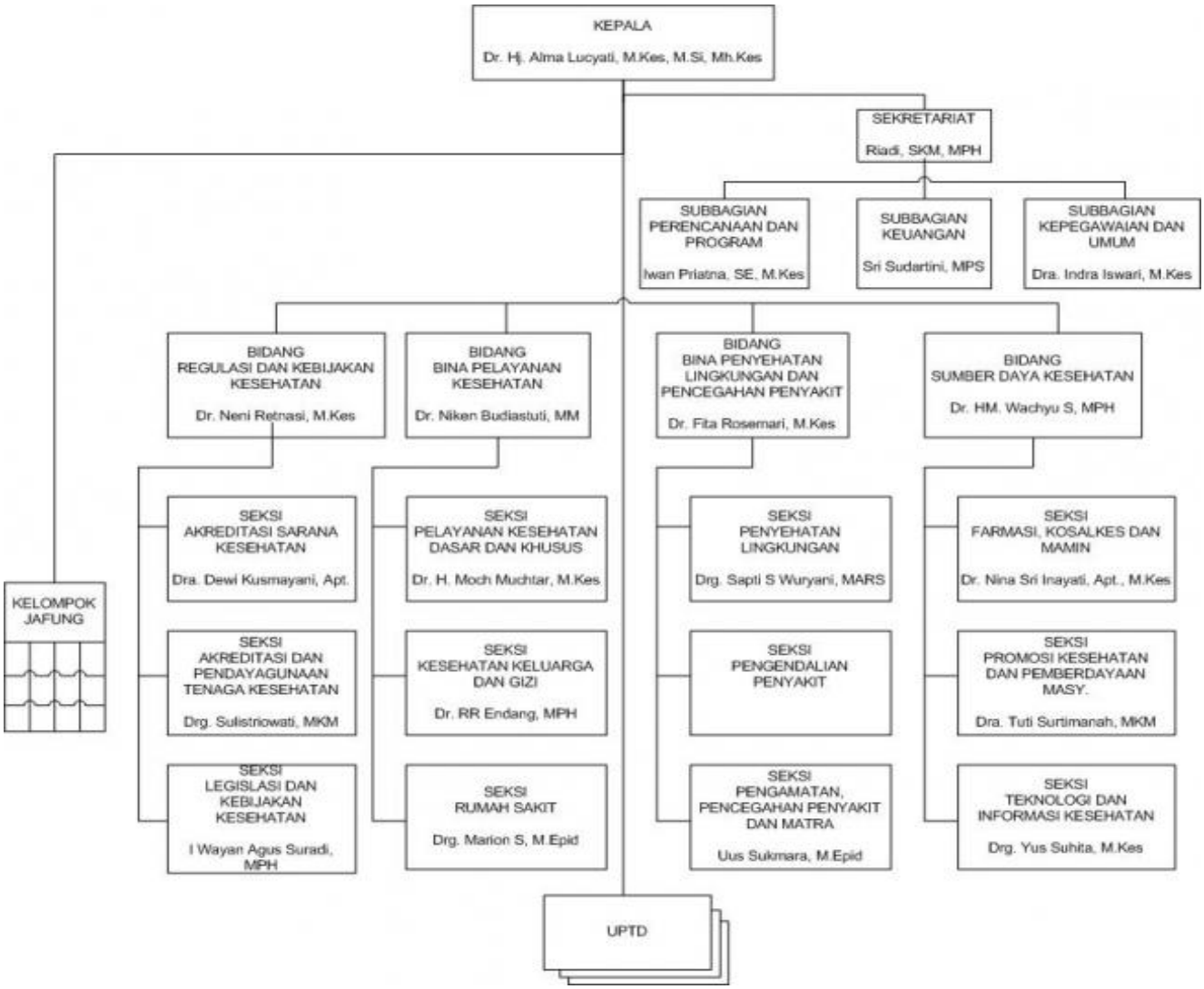
   1. Seksi penyehatan lingkungan
   2. Seksi pengendalian penyakit
   3. Seksi pengamatan, pencegahan penyakit dan matra

F. Bidang Sumber Daya Kesehatan

1. Seksi farmasi, kosmetika, alat kesehatan dan makanan-minuman
2. Seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
3. Seksi teknologi dan informasi kesehatan

Dibawah ini merupakan bagan struktur organisasi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



Sumber *www.diskesjabar.go.id Tahun 2010*

Berdasarkan struktur organisasi diatas kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok sebagai penanggung jawab instansi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terdiri dari pertama penanggung jawab sekretariat yang dibantu oleh sub bagian perencanaan dan program, sub bagian keuangan, sub bagian kepegawaian dan umum. Kedua penanggung jawab bidang regulasi dan kebijakan kesehatan yang dibantu oleh seksi akreditasi sarana kesehatan, seksi akreditasi dan pendayagunaan tenaga kesehatan, seksi legislasi dan kebijakan kesehatan. Ketiga penanggung jawab bidang bina pelayanan kesehatan yang dibantu oleh seksi pelayanan kesehatan dasar dan khusus, seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi rumah sakit. Keempat penanggung jawab bidang bina penyehatan lingkungan dan pencegahan penyakit yang dibantu oleh seksi penyehatan lingkungan, seksi pengendalian penyakit, seksi penghangatan, pencegahan penyakit dan matra. Kelima penanggung jawab bidang sumber daya kesehatan yang dibantu oleh seksi farmasi, kosalkes dan mamin, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, seksi teknologi dan informasi kesehatan.

3.3 Gambaran Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SIM SP3) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pembangunan upaya kesehatan masyarakat dilakukan diseluruh pelosok Jawa Barat, melalui keberadaan Puskesmas, Puskesmas dengan Ruang Perawatan, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan juga keberadaan Bidan di Desa. Fungsi inditusi kesehatan terdepan (Puskesmas) tidak sekedar sebagai pemberi

pelayanan kesehatan saja, namun juga melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan masyarakat baik yang bersifat *promotif, preventif,* kuratif bahkan terkadang sampai rehabilitasi. Disamping itu pembinaan terhadap sarananya baik milik pemerintah maupun swasta dan penggerakan peran serta masyarakat dibidang kesehatan yang berada di wilayah kerjanya yang menjadi tanggung jawabnya.

Semua pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dicatat dan dilaporkan secara teratur, tepat waktu dan dengan pengisian data yang benar. Dalam era pembangunan ini keberadaan data dan informasi memegang peran yang sangat penting. Data yang benar-benar akurat, terpercaya, bersinambungan, tepat waktu dan mutakhir, sangat diperlukan dalam pengelolaan program, perencanaan, pemantauan pelaksanaan program dan proyek serta kegiatan yang akan dilakukan.

Salah satu pemantapan dan pengembangan SIK melalui pengumpulan data di Puskesmas. Dalam gerak pelaksanaanya masih banyak masalah dan kendala yang dihadapi baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun di Provinsi. Upaya pemecahan masalahnya antara lain melalui penyempurnaan SIM SP3 yang merupakan sebagian kecil dari SIK yang telah diakui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas dan dapat dimanfaatkan diberbagai jenjang administrasi sejak tahun 1981, yang dulunya disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).

SIM SP3 Revisi I mulai dilaksanakan pada tahun 1996, Perkembangan SIM SP3 telah mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1996 sampai sekarang dalam upaya pembenahan untuk menyesuaikan pemanfaatan data yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan waktu.

Dari hasil supervisi dan pemantauan yang dilaksanakan oleh tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas, masih banyak hal-hal yang menjadi halangan dalam melaksanakan SIM SP3 baik menyangkut tentang pencatatan, pengolahan maupun pelaporannya. Hal-hal yang berakibatkan laporan SIM SP3 menjadi tidak lengkap, tidak tepat waktu dan kebenarannya yang diragukan dapat diidentifikasikan antara lain meliputi, data yang dilaporkan tidak semuanya dapat dimanfaatkan baik dari aspek *monitoring* maupun dari aspek evaluasi.

Tidak adanya atau kurang petugas khusus di bidang informasi baik di tingkat Puskesmas maupun ditingkat yang lebih tinggi. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pencatatan, pengolahan maupun pelaporan, kurang terampilnya petugas penyedia, pengumpul dan pengolah data dan pembuat laporan, kurangnya tingkat kesadaran petugas akan pentingnya dan manfaatnya data dan informasi, semua kegiatan harus dicatat selengakap mungkin, meskipun yang dilaporkan terbatas.

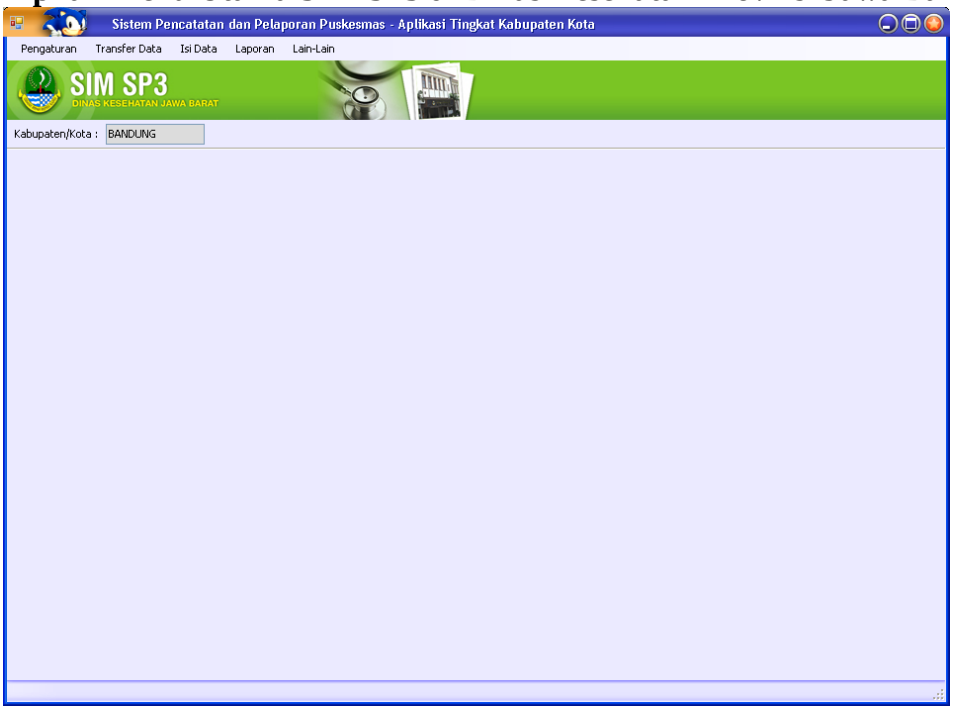
Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi, maka tahun 2008 sistem pelaporan ini disempurnakan kembali sebagai Revisi II. SIM SP3 Revisi II merupakan ”SP3-Program” yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pemegang, pengelola atau pelaksana program disemua tingakatan administrasi mempunyai peran yang sangat penting dami tercapainya *”Evidence Based"*.

Peraturan UU yang menyebutkan sistem informasi kesehatan yaitu Kepmenkes Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Laporan informasi Kesehatan Provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintaha Daerah Kabupaten atau Kota, UU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pembenahan SIM SP3 ini dapat menghilangkan faktor masalah yang ada saat ini. Namun masih perlu dipikirkan tentang aspek pelaksanaan dan juga kesediaan pihak swasta untukl melaksanakan pelaporan tersebut dengan tertib. Dalam buku pedoman SIM SP3 disajikan tentang tujuan SIM SP3, cara pengisian, pengertian-pengertian dan batasan-batasan operasional yang dipergunakan.

Di bawah ini merupakan gambar tampilan Sistem Informasi Manajemen Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SIM SP3) yang hanya digunakan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengolah data dan menginput data mengenai kesehatan, sebagai berikut:

Gambar 3.4
Tampilan Menu Utama SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

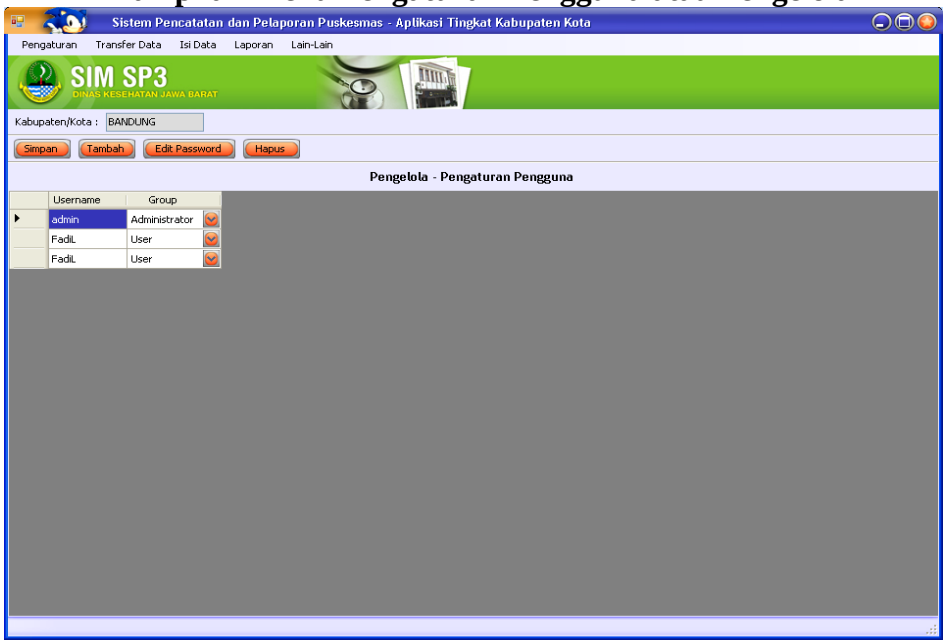


Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.4 menunjukan tampilan menu utama SIM SP3, pada tampilan menu utama SIM SP3 terdapat lima menu yaitu menu pertama merupakan bagian pengaturan yang di dalamnya terdiri dari pengelola atau pengaturan pengguna, lokasi kabupaten/kota, manajemen master tabel, manajemen master wilayah, manajemen master data table dan manajemen database.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk mengisi data pengelola atau pengaturan pengguna dapat dilihat pada gambar berikut ini:

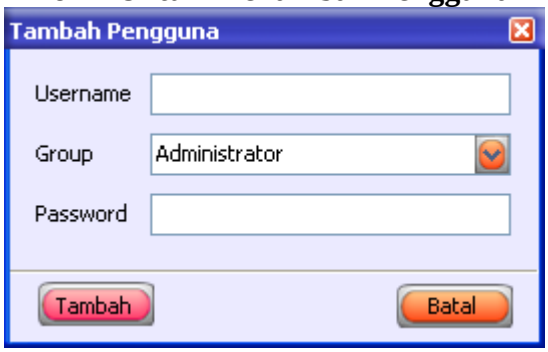
Gambar 3.5
Tampilan Menu Pengaturan Pengguna atau Pengelola



Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.5 menunjukan tampilan menu pengaturan pengguna atau pengelola, yang didalamnya teridiri dari *user* dan group. Pengelola atau pengguna yang akan menggunakan kemudian di minta untuk memasukan username, group (terdiri dari admininstrator dan *user*) dan password. Setelah itu pengguna atau pengelola mengklik tombol tambah yang kemudian akan muncul tampilan form seperti gambar berikut ini:

Gambar 3.6
Form Untuk Menambah Pengguna

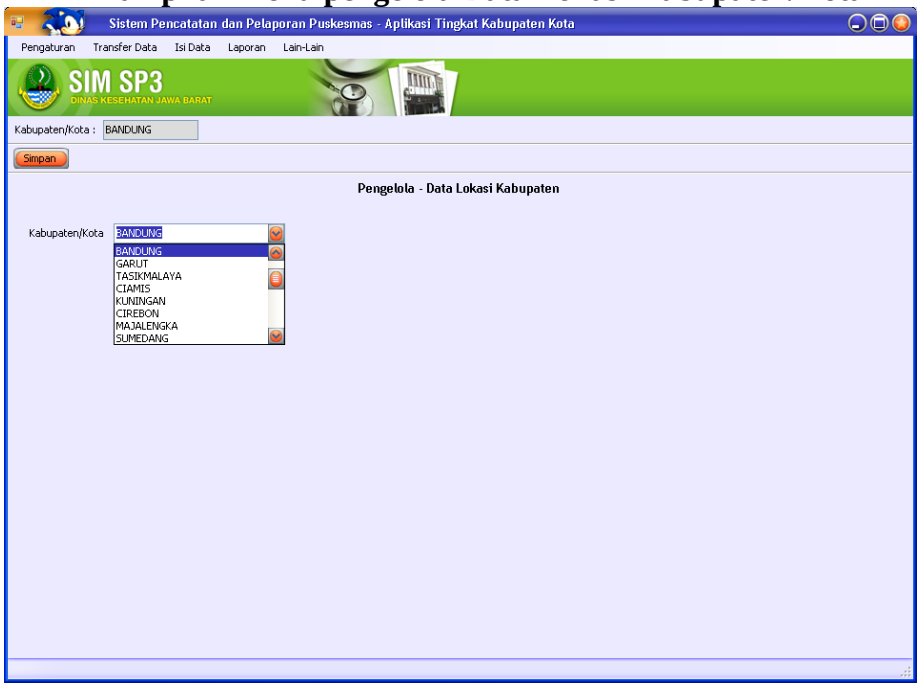


Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.6 menunjukan form untuk mengisi data pengelola atau pengaturan pengguna yang akan menggunakan SIM SP3. Pengelola atau pengguna disini yaitu aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena SIM SP3 tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat. Aplikasi SIM SP3 ini hanya di gunakan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saja, Karena aplikasi ini bersifat *Government to Government*. pertama mengklik menu pengaturan kemudian akan tampil beberapa sub menu diantaranya sub menu pengguna, setelah mengklik sub menu pengguna akan muncul tampilan beberapa tombol yaitu tombol simpan, tombol tambah, tombol edit password, form hapus, username dan form group. Pengelola atau pengguna kemudian di minta untuk memasukan username, group (terdiri dari admininstrator dan *user*) dan password. Setelah memasukan data ketiga form tersebut pengelola atau pengguna kemudian mengklik form tambah, jika pengelola atau pengguna ingin membatalkannya tinggal klik form batal.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk pemilihan Kabupaten/Kota yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.7
Tampilan menu pengelola Data Lokasi Kabupaten/Kota



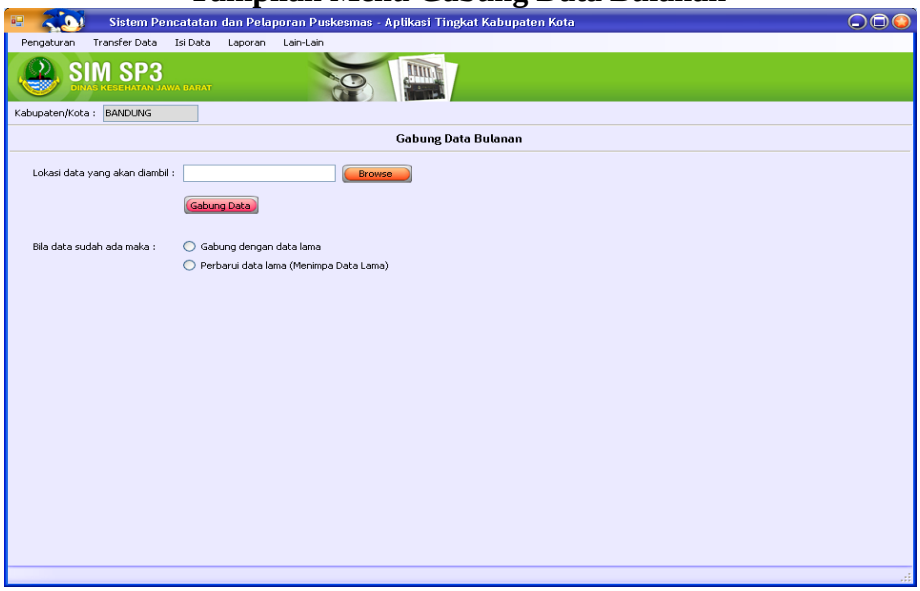
Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.7 menunjukan form untuk pemilihan data lokasi Kabupaten/Kota oleh pengelola atau pengguna yang akan melihat data yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, jika pengguna atau pengelola ingin melihat data yang ada di Kabupaten/Kota yang mana akan dilihat tinggal mengklik pengaturan kemudian masuk ke sub menu lokasi Kabupaten/Kota. Setelah memilih Kabupaten/Kota mana yang akan dipilih pengguna tinggal klik tombol simpan pada tombol simpan. Seperti contoh tampilan diatas yang akan memilih Kabupaten Bandung, klik Kabupaten Bandung kemudian klik tombol

simpan maka data yang akan keluar semuanya merupakan data yang ada di Kabupaten Bandung.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk menggabungkan data yang ada di Kabupaten/Kota yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.8
Tampilan Menu Gabung Data Bulanan



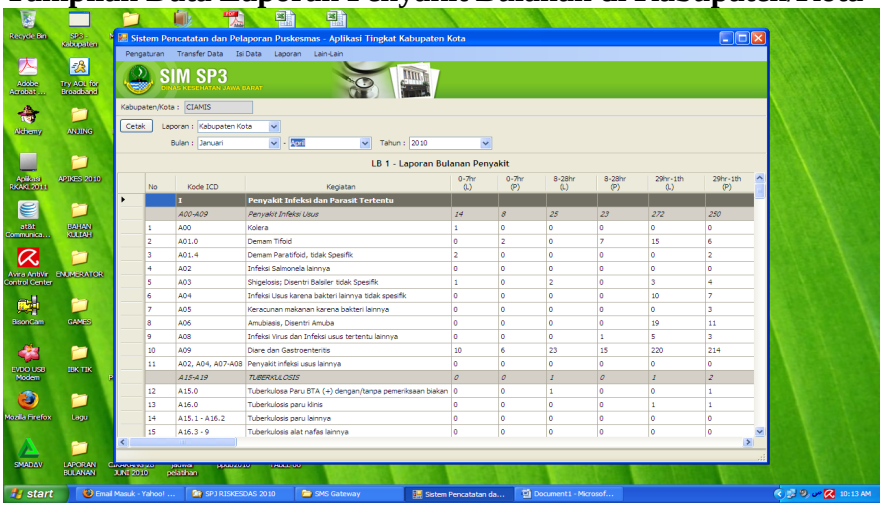
Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.8 menunjukan form untuk menggabungkan data yang ada di Kabupaten/Kota, pengelola atau pengguna yang akan menggabungkan data masuk ke pengaturan kemudian pilih sub menu manajemen tabel dan pilih laporan bulanan atau laporan tahunan yang akan digabungkan dengan cara browse lokasi data yang akan diambil. Jika lokasi data yang akan diambil sudah ditentukan maka pengguna tinggal mengklik tombol browse, apabila data sudah ada maka

pengguna tinggal memilih opsi gabung dengan data lama atau ospsi perbarui data lama (menimpa data lama).

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk melihat data tentang laporan bulanan penyakit yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.9
Tampilan Data Laporan Penyakit Bulanan di Kabupaten/Kota



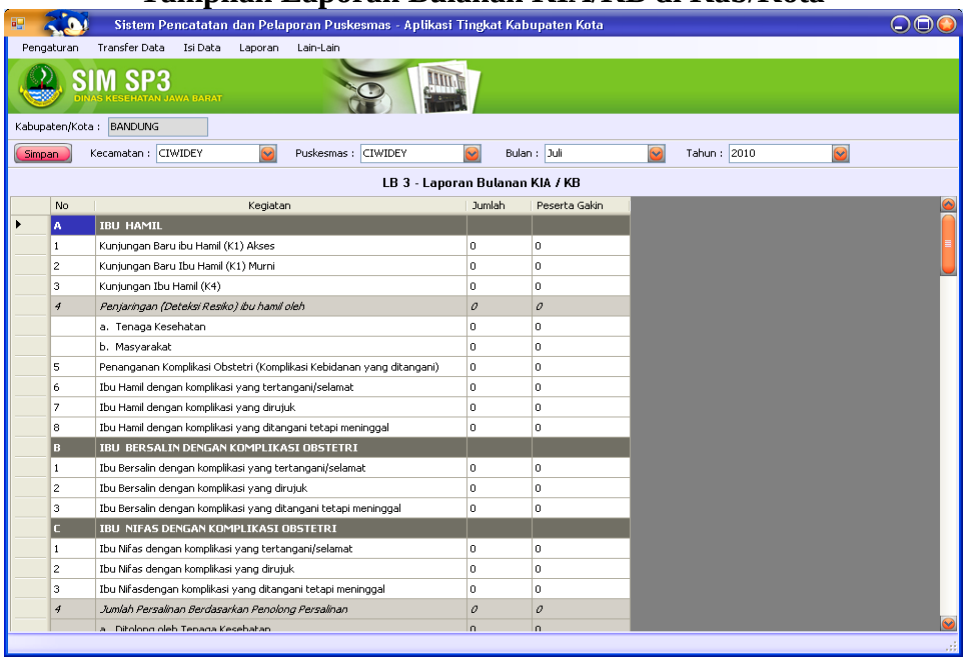
Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.9 menunjukan tampilan dari isi data LB1 mengenai laporan bulanan mengenai data kesakitan/penyakit yang ada di Kabupaten/Kota. Laporan bulanan penyakit LB1 merupakan laporan bulanan mengenai data kesakitan mencakup data di wilayah kerja puskesmas, berdasarkan penderita yang berobat ke puskesmas dan jejaring puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas. Contohnya seperti gambar tampilan diatas berisi data LB1 mengenai laporan penyakit yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan data diatas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui penyakit apa yang sedang musim atau

ngetrend di Kabupaten Ciamis pada bulan itu, yang mana pada data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Ciamis saat itu banyak yang terjangkit penyakit diare.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk melihat data tentang laporan bulanan KIA/KB yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.10
Tampilan Laporan Bulanan KIA/KB di Kab/Kota



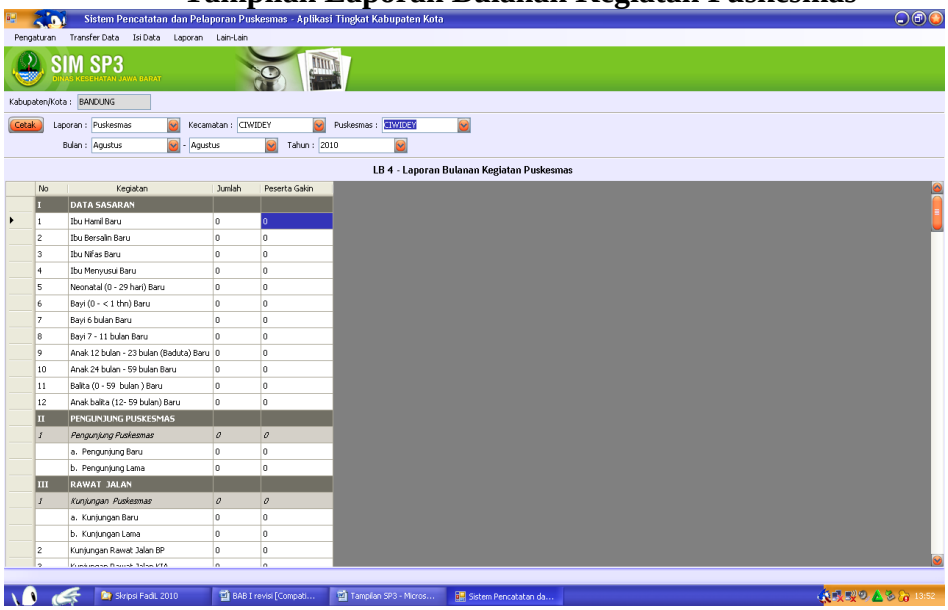
Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.10 menunjukan tampilan dari isi data LB3 mengenai laporan bulanan KIA/KB yang ada di Kabupaten/Kota, laporan bulanan kegiatan puskesmas LB3 merupakan laporan bulanan program KIA/KB, Gizi, dan pemberantasan pencegahan penyakit yang ada di puskesmas dan jejaring puskesmas yang ada di wilayah kerja puskesmas. contohnya seperti gambar tampilan diatas berisi data LB3 mengenai laporan bulanan KIA/KB yang ada di

Kabupaten Bandung Kecamatan Ciwidey. Berdasarkan data diatas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui bagaimana informasi mengenai laporan bulanan tentang KIA/KB yang ada di Kabupaten Bandung.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk melihat data tentang laporan bulanan kegiatan puskesmas yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.11
Tampilan Laporan Bulanan Kegiatan Puskesmas



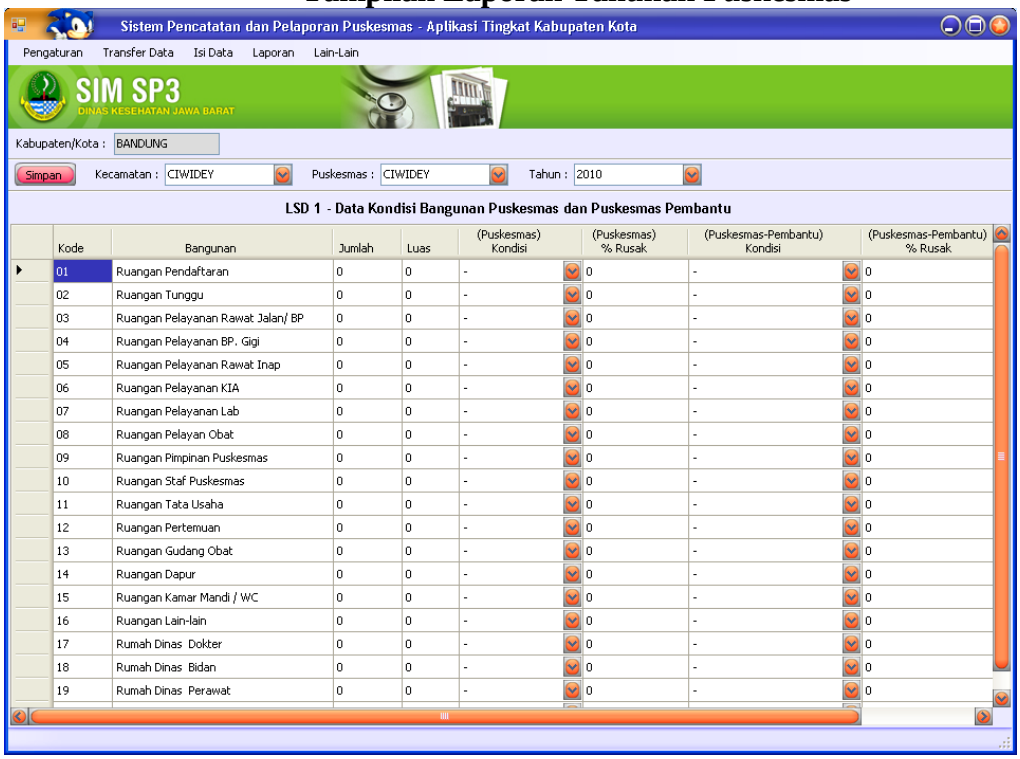
Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.11 menunjukan tampilan dari isi data LB4 mengenai laporan bulanan kegiatan puskesmas, contohnya seperti gambar tampilan diatas berisi data LB4 mengenai laporan kegiatan puskesmas. Laporan kegiatan puskesmas (LB4) merupakan laporan bulanan kegiatan puskesmas, termasuk pelayanan baik di puskesmas dan jejaring puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk melihat data tentang laporan data bangunan puskesmas dan

puskesmas pembantu yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.12
Tampilan Laporan Tahunan Puskesmas



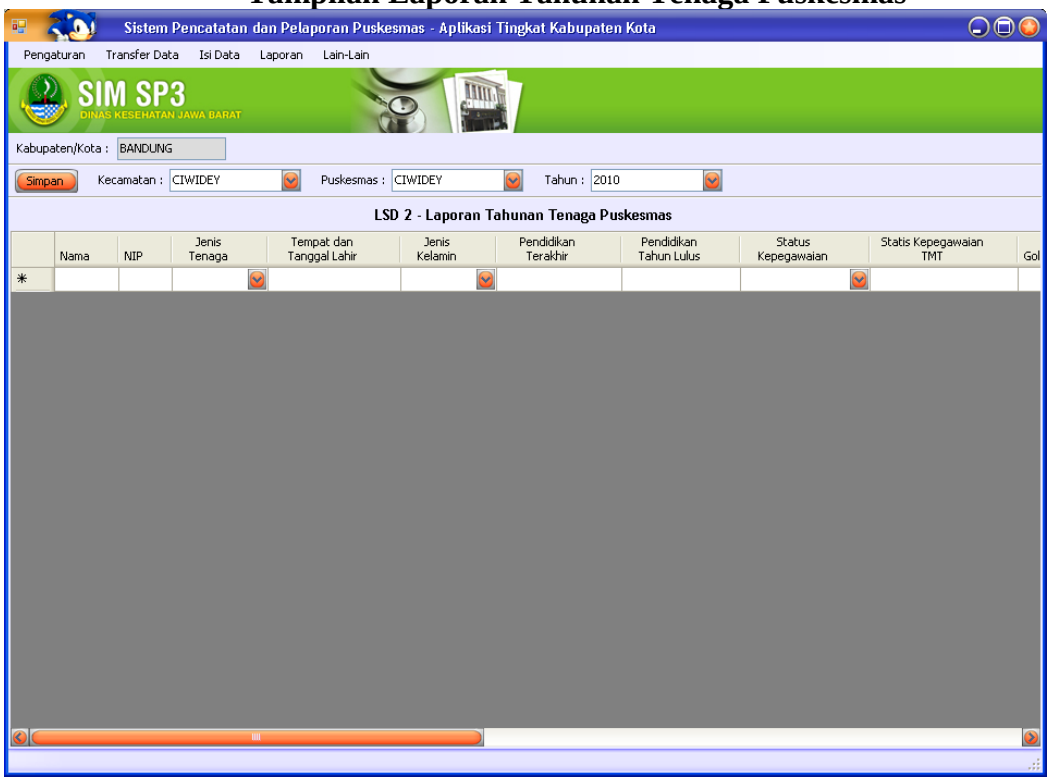
Kode	Bangunan	Jumlah	Luas	(Puskesmas) Kondisi	(Puskesmas) % Rusak	(Puskesmas-Pembantu) Kondisi	(Puskesmas-Pembantu) % Rusak
01	Ruangan Pendaftaran	0	0	-	0	-	0
02	Ruangan Tunggu	0	0	-	0	-	0
03	Ruangan Pelayanan Rawat Jalan/ BP	0	0	-	0	-	0
04	Ruangan Pelayanan BP. Gigi	0	0	-	0	-	0
05	Ruangan Pelayanan Rawat Inap	0	0	-	0	-	0
06	Ruangan Pelayanan KIA	0	0	-	0	-	0
07	Ruangan Pelayanan Lab	0	0	-	0	-	0
08	Ruangan Pelayan Obat	0	0	-	0	-	0
09	Ruangan Pimpinan Puskesmas	0	0	-	0	-	0
10	Ruangan Staf Puskesmas	0	0	-	0	-	0
11	Ruangan Tata Usaha	0	0	-	0	-	0
12	Ruangan Pertemuan	0	0	-	0	-	0
13	Ruangan Gudang Obat	0	0	-	0	-	0
14	Ruangan Dapur	0	0	-	0	-	0
15	Ruangan Kamar Mandi / WC	0	0	-	0	-	0
16	Ruangan Lain-lain	0	0	-	0	-	0
17	Rumah Dinas Dokter	0	0	-	0	-	0
18	Rumah Dinas Bidan	0	0	-	0	-	0
19	Rumah Dinas Perawat	0	0	-	0	-	0

Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.12 menunjukan tampilan dari isi data LSD 1 mengenai laporan data bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu, contohnya seperti gambar tampilan diatas berisi data LSD 1 mengenai laporan data bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu. Berdasarkan data diatas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui bagaimana informasi mengenai laporan data bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Pada tampilan menu pengaturan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk melihat data tentang laporan tahunan puskesmas yang akan di cari pengelola atau pengguna dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.13
Tampilan Laporan Tahunan Tenaga Puskesmas



Sumber SIM SP3 Tahun 2010

Gambar 3.13 menunjukan tampilan dari isi data LSD 2 mengenai laporan tahunan tenaga puskesmas, contohnya seperti gambar tampilan diatas berisi data LSD 2 mengenai laporan tahunan tenaga puskesmas. Berdasarkan data diatas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat mengetahui bagaimana informasi mengenai laporan tahunan tenaga puskesmas yang ada di puskesmas Provinsi Jawa Barat.